Indikator Ekonomi

Kabupaten Sidoarjo

Tahun

2021

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Indikator Ekonomi

Kabupaten Sidoarjo

Tahun

2021

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Publikasi Indikator Ekonomi
Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pembangunan harus terus menerus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Seluruh tahapan proses pembangunan tersebut tentunya sangat memerlukan berbagai indikator sebagai *benchmark* dari keberhasilan pembangunan tersebut.

Publikasi ini memuat analisis deskriptif dari berbagai indikator ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa indikator ekonomi pada publikasi ini antara lain: Keuangan Daerah, Produksi (Industri dan Padi), Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Gini Ratio, Analisis *Location Quotient* (LQ), Model rasio Pertumbuhan (MRP), Perhotelan, dan Perhubungan. Data pendukung dalam publikasi ini berasal dari beberapa sumber yaitu Badan Pusat Statistik serta data pendukung dari instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo.

Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini manfaat bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Oktober 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

Daftar Tabel vii

Daftar Gambar viii

1. Indikator Ekonomi dan Pembangunan 1
2. Ruang Lingkup Indikator Ekonomi 3
   1. Keuangan Daerah 17
   2. Produksi 21
   3. Produk Domestik Regional Bruto 31
   4. Gini Ratio 47
   5. Inflasi 49
   6. Hotel dan Pariwisata 49
   7. Perhubungan 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Belanja Tahun 2018–2020 (Juta Rupiah) 17

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Besar-Sedang di Kab. Sidoarjo menurut Kecamatan Tahun 2020 23

Tabel 3. Persentase Perusahaan Industri Besar-Sedang menurut Jenisnya di Kabupaten Sidaorjo Tahun 2020 25

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Reginal Bruto ADHB Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020 32

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Sidoarjo Tahun 2020 37

Tabel 6. Analisis *Location Quotient* (LQ) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020 39

Tabel 7. Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020 41

Tabel 8. Inflasi dan Sumbangan Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Kab. Sidoarjo Tahun 2020 55

Tabel 9. Sepuluh Komoditas Utama Pendorong Inflasi Kab. Sidoarjo Tahun 2020 57

Tabel 10. Sepuluh Komoditas Utama Penghambat Inflasi Kab. Sidoarjo Tahun 2020 58

Tabel 11. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Luar Negeri dan Domestik Pada Hotel Berbintang 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kurva Lorentz 15
Gambar 2. Luas Panen Padi Bulanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020 (Ribuan Hektar) 27
Gambar 3. Konsumsi (Ton Beras) dan Produksi (Ton Beras) Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020 28
Gambar 4. Surplus/Defisit Beras menurut *Subround* di Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020 29
Gambar 5. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Positif di Kab. Sidoarjo Tahun 2020 35
Gambar 6. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Negatif (Kontraksi) di Kab. Sidoarjo Tahun 2020 36
Gambar 7. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Positif di Kab. Sidoarjo Tahun 2020 48
Gambar 8. Inflasi (Kalender) Bulanan Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020 50
Gambar 9. Inflasi (Kalender) Bulanan Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 –2020 51
Gambar 10. Inflasi (Kalender) Bulanan Provinsi Jawa Timur 52
Gambar 11. Inflasi (Kalender) Bulanan Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya Tahun 2020 53
Gambar 12. Tingkat Penghunian Kamar (%) Hotel Berbintang Kab. Sidoarjo Tahun 2019-2020 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 13. Komposisi Tamu Hotel Berbintang Kab. Sidoarjo
Tahun 2020 62

Gambar 14. Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2019-2020
dan Pertumbuhan Jumlah Penumpang Tahun (year-on-year) Kab. Sidoarjo 63

Indikator Ekonomi dan Pembangunan

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan usaha menggeser (peranan) dari kegiatan yang dominan di sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Untuk melaksanakan pembangunan dengan lebih terarah, maka pemerintah bersama-sama masyarakat telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020. Visi dan misi tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Sidoarjo dan bukan hanya menyentuh wilayah maupun kelompok masyarakat tertentu.

RPJP Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat setempat dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Sidoarjo. Agenda dan prioritas pembangunan yang telah disusun dan dirancang di dalam RPJMD akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan

pemerintahan saat ini maupun tahun mendatang. Pada akhirnya pembangunan yang telah dilaksanakan akan mewujudkan kemakmuran bersama serta tidak boleh ada yang terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan program/kegiatan perencanaan yang sesuai dengan visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sangat diperlukan dukungan data statistik yang akurat, lengkap dan terkini. Data statisktik tersebut akan menjadi suatu instrumen yang sangat berguna untuk memonitor proses pembangunan yang sedang berjalan maupun sebagai alat evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Keputusan Bupati Nomor: 188/732/438.1.1.3/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kristalisasi terhadap lebih dari seratus indikator pembangunan menjadi 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. Sepuluh indikator tersebut antara lain Indeks Good Governance, Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Penetapan sepuluh indikator kinerja utama digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilias kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan serta pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Ruang Lingkup Indikator Ekonomi

Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang diubah menjadi Pergemndagri No. 21 Tahun 2011, kelompok belanja terdiri atas:

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- Belanja Pegawai

  Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang atau dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bunga

  Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- Subsidi

  Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/

lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

- Hibah

  Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- Bantuan Sosial

  Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- Belanja Bagi hasil

  Belanja Bagi Hasil sebagaimana digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah
  Iainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

- Bantuan Keuangan

  Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/ atau desa penerima bantuan.

- Belanja Tidak Terduga

  Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- Belanja Langsung

  Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai

  Belanja pegawai pada kelompok ini meliputi pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- Belanja Barang dan Jasa

  Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

- Belanja Modal

  Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Luas Lahan

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan

Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru. Lahan sawah mencakup pengairan, tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebah dan lain sebagainya.

Luas Panen

Luas panen berhasil (Luas panen) adalah tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil ini termasuk juga tanaman yang hasilnya sebagian saja dapat dipungut (paling sedikit sampai dengan 11%) yang mungkin disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu tumbuhan atau bencana alam. Mencabut bibit ini tidak termasuk sebagai memungut hasil dan tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan luas panen.

Produksi

Estimasi rata-rata jumlah beras yang dapat dihasilkan pada periode tertentu.

Konsumsi

Estimasi rata-rata jumlah beras yang dikonsumsi masyarakat pada periode tertentu.

Surplus/Defisit

Selisih jumlah beras yang dikonsumsi dengan jumlah beras yang dapat diproduksi pada periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisinya, PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu

tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Jadi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara Agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi di daerah tersebut, atau merupakan "PRODUCTION ORIGINATED".

Nilai barang dan jasa dalam PDRB adalah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanyan tahunan atau

Nilai Tambah = Output – Biaya Antara

triwulanan). Rebasing (pergeseran tahun dasar terakhir) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam 17 kategori lapangan usaha, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

PDRB disajikan dalam dua dasar penghitungan:

a. **Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**, yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu.

b. **Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**, yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar) fungsinya agar perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan perkembangan riil dari kuantum produksi dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). PDRB ADHK digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

Analisis *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik output/nilai tambah atau kesempatan kerja untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (economic base) masyarakat daerah/lokal (Arsyad, 1999). Sementara itu yang termasuk kedalam basis ekonomi masyarakat adalah sektor-sektor yang memiliki karakteristik menyangkut tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Analisis LQ memberikan kerangka pengertian tentang stabilitas dan fleksibilitas perekonomian masyarakat untuk merubah kondisi melalui penyelidikan terhadap derajat industri-industri/sektor-sektor yang ada dilingkungan masyarakat (Heilbrun, 1987 dalam Kharisma dan Hardiyanto, 2020).

Analisis LQ sering digunakan untuk mengestimasi industri ekspor atau basic industry, dimana industri tersebut memiliki karakteristik dapat membawa sejumlah unit uang kepada masyarakat melalui ekspor barang dan jasa, industri yang seperti ini kemudian dikenal dengan nama industri-industri basis (basic industries). Sementara itu industri-industri yang bergerak men-supply barang dan jasa untuk kegunaan konsumsi lokal/daerah dinamakan sebagai industri-industri non basis.

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Arsyad (1999) mengatakan bahwa model rasio pertumbuhan merupakan alat untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dengan formula:

- Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

RPs adalah: perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan/tenaga kerja kegiatan *i* wilayah studi dengan laju pertumbuhan pendapatan/tenaga kerja kegiatan *i* di wilayah referensi.

- Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

  RPr adalah: perbandingan antara laju petumbuhan pendapatan / tenaga kerja kegiatan i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) / total tenaga kerja wilayah referensi.

Berbeda dengan analisis LQ, analisis MRP menggunakan basis pertumbuhan dimana perhitungan pertumbuhan tidak selalu positif. Oleh karena itu, Yusuf (1999) menyebutkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul dari analisis MRP sebagai berikut:

- Jika RPr dan RPs dimana pembilang (+) dan penyebut (+), maka analisis dapat dilakukan langsung yaitu (=) untuk > 1 dan (-) untuk < 1.
- Jika RPr dan RPs dimana pembilang (+) dan penyebut (-), maka analisis langsung memberikan nilai (+).
- Jika RPr dan RPs dimana pembilang (-) dan penyebut (+), maka analisis langsung memberikan nilai (-).
- Jika RPr dan RPs dimana pembilang (-) dan penyebut (-), perlu dilakukan pertimbangan yang lebih jauh mengingat ada dua kemungkinan yaitu:
  1. Pembilang > penyebut, maka analisis memberikan nilai (+)
  2. Pembilang < penyebut, maka analisis langsung memberikan nilai (-)
- Jika RPr dan RPs mempunyai nilai dan tanda yang sama maka pengertiannya adalah sama seperti analisis LQ dan interpretasi tanda (+) atau (-) ditentukan

tergantung dari data *existing* yang tersedia.

Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama. Sejalan dengan kenaikan tersebut, nilai uang turun secara tajam sebanding dengan kenaikan harga-harga barang tersebut. Inflasi dapat dihitung dengan banyak pendekatan, untuk Kabupaten Sidoarjo inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah adalah indeks yang diperoleh dari hasil perbandingan Nilai Konsumsi pada bulan berjalan dengan Nilai Konsumsi dasar Kabupaten Sidoarjo dari hasil penghitungan dan penyesuaian dari hasil SBH-2018 Kota Surabaya.

$$Inflasi_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} x100 \qquad (11)$$

dimana:

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun ke-t

$IHKt_{-1}$= Indeks Harga Konsumen tahun ke-t-1

$Inflasi_t$= Inflasi Tahun ke-t

Perhotelan

Kegiatan perhotelan dan pariwisata masuk ke dalam jenis usaha akomodasi.

Usaha akomodasi adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lain dengan pembayaran. Secara garis besar usaha akomodasi dibedakan menjadi dua golongan yaitu hotel bintang dan usaha akomodasi lainnya.

Hotel Bintang adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari bangunan yang disediakan secara khusus, setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, serta sarana rekreasi atau olah raga yang disediakan seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik. Ciri khusus hotel bintang adalah mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut.Hotel bintang dirinci menjadi Bintang 1, Bintang 2, Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (dalam persen) 27. Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap

Usaha Akomodasi Lainnya adalah semua usaha akomodasi yang tidak termasuk hotel bintang yang terdiri atas hotel melati, penginapan remaja (youth hostel), pondok wisata (home stay), perkemahan dan jasa akomodasi lainnya seperti motel, losmen, penginapan dan sejenisnya.

Gini Rasio

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan apakah pendistribusian dari pendapatan merata secara nyata. Koefisien Gini merupakan rasio antara garis 45 derajat dengan Kurva Lorenz dan area dalam segitiga. Koefisien ini bernilai 0 (nol), jika distribusi menyebar merata secara nyata, dan mendekati 1 (satu), jika secara nyata menyebar tidak merata. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Untuk mendapatkan Gini rasio, data yang digunakan adalah data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang lalu dari hasil Susenas. Data tersebut diurutkan berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dari yang terendah sampai tertinggi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan menjadi lima kelompok penduduk yang jumlahnya sama besar, berdasarkan urutan tersebut. Kemudian dihitung persentase total pengeluaran untuk tiap kelompok. Dengan metode ini, selain dapat diperoleh Koefisien Gini, juga dapat diperoleh indikator distribusi pendapatan (pengeluaran) menurut Bank Dunia. Bentuk umum dari Kurva Lorenz yang menggambarkan antara kumulatif penduduk dengan kumulatif pengeluaran adalah seperti gambar berikut:

Gambar 1 Kurva Lorentz

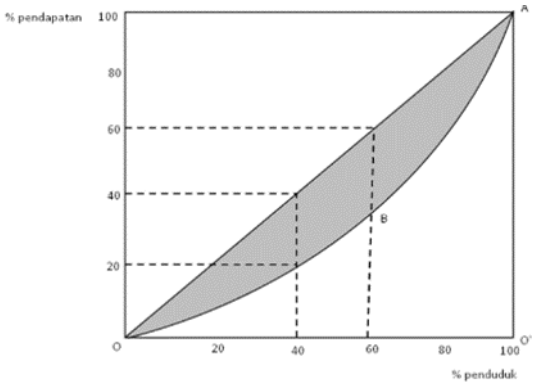

Data yang diperoleh kemudian dilakukan *scatter plot*, dengan terlebih dahulu mengkumulatifkan total pengeluaran perkapita, sehingga akan diperoleh hasil plot seperti Gambar 1 Formula untuk menghitung Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$Gini\ Ratio = \frac{Luas\ daerah\ yang\ terletak\ di\ antara\ OA\ dan\ OAB}{Seluruh\ daerah\ OAO'}$$

Atau,

$$Gini\ Ratio = \sum_{k=1}^{n-1} C_{k+1} P_k - \sum_{k=1}^{n-1} C_k P_{k+1}$$

Dimana,

C = Persentase kumulatif konsumsi,
P = Persentase kumulatif penduduk,
k = Kelompok kelas ke- (1,2,3,...,n).

1 Keuangan Daerah

Struktur anggaran/belanja daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam upaya pembangunan. Setiap negara/wilayah memiliki keterbatasan pada bidang tertetu, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif secara kreatif dan inovatif. Struktur belanja daerah secara keseluruhan sedikit banyak akan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai struktur anggaran/ belanja daerah dalam menunjang pembangunan berikut disajikan secara rinci melalui Tabel 1:

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Belanja Tahun 2018–2020 (Juta Rupiah)

No	Jenis Belanja	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Belanja Tidak Langsung**	**2,061,180**	**2,391,171**	**2,349,233**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sidoarjo Tahun 2020

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Belanja Tahun 2018–2020 (Juta Rupiah) (Lanjutan)

No	Jenis Belanja	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.1. Belanja Pegawai	1,274,410	1,490,511	1,286,796
	1.2. Belanja Bunga	-	-	-
	1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
	1.4. Belanja Hibah	217,991	211,250	258,001
	1.5. Belanja Bantuan Sosial	57,659	82,385	86,332
	1.6. Belanja Bagi Hasil	113,512	115,583	92,531
	1.7. Belanja Bantuan Keuangan	397,608	447,815	493,492
	1.8. Belanja Tidak Terduga	-	43,628	132,081
2	**Belanja Langsung**	**2,127,358**	**3,031,953**	**2,092,441**
	2.1. Belanja Pegawai	145,368	261,871	274,665
	2.2. Belanja Barang dan Jasa	1,171,424	1,464,886	1,298,523
	2.3. Belanja Modal	810,565	1,305,196	519,253
Jumlah		**4188537.8**	**5423124.4**	**4441673.3**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sidoarjo Tahun 2020

Pada kondisi normal, rata-rata realisasi belanja pemerintah daerah berkisar antara 3,7 – 4,00 triliun rupiah setiap tahunnya. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan realisasi belanja pemerintah pada tahun 2020 naik sekitar 6 persen jika dibanding dengan rata-rata tahun sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi covid-19 mulai dari memberikan bantuan sosial, bantuan keuangan, maupun belanja tidak langsung lainnya yang tidak tertera dalam rencana anggaran.

Berdasarkan Tabel 1 nilai belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga paling tinggi terdapat pada tahun 2020. Pandemi membuat aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas baik secara sosial maupun ekonomi, oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat selama pandemi (khususnya masyarakat kelompok miskin dan rentan miskin) pemerintah daerah memberikan beragam bantuan mulai dari bantuan sosial, ekonomi, dan lain sebagiannya.

2 Produksi

Industri

Industri pengolahan merupakan *leading sector* kegiatan perekonomian di Kabupaten selama lebih dari satu dekade terakhir, bahkan setelah terjadinya kontraksi perekonomian akibat Pandemi Covid-19 indusri pengolahan tetap menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi. Nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan pada tahun 2020 mencapai 100.918 miliar rupiah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 51,17 persen terhadap nilai PDRB pada tahun 2020.

Kontraksi perekonomian menyebabkan penurunan nilai tambah dan perlambatan pertumbuhan hampir pada semua lapangan usaha, meskipun begitu kontribusi lapangan usaha industri pengolahan tetap tinggi. Pada tahun 2018 misalnya kontribusi sektor industri pengolahan adalah 46,72 persen, tahun 2019 naik 1,14 persen menjadi 47,86 persen, dan pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan yaitu 3,31 persen menjadi 51,17 persen. Pandemi covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha industri pengolahan dimana pada tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 8,89 persen dan tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 0,98 persen.

Besar kecilnya kontribusi dan pertumbuhan nilai tambah ditentukan oleh banyaknya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan, dimana jumlah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan pada tahun 2020 adalah sekitar 961 perusahaan dengan skala besar dan sedang. Berdasarkan jumlah karyawan, industri pengolahan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu industri sedang (0 – 99 karyawan) dan industri besar (> 100 karyawan). Berikut jumlah industri besar-sedang di Kabupaten Sidoarjo menurut kecamatan:

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Besar-Sedang di Kab. Sidoarjo menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Industri Sedang	Industri Besar
(1)	(2)	(3)
Tarik	3	1
Prambon	10	0
Krembung	16	1
Porong	7	0
Jabon	14	0
Tanggulangin	19	10
Candi	31	13
Tulangan	13	1
Wonoayu	20	14

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahun 2020

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Besar-Sedang di Kab. Sidoarjo menurut Kecamatan Tahun 2020 (Lanjutan)

Kecamatan	Industri Sedang	Industri Besar
(1)	(2)	(3)
Sukodono	22	6
Sidoarjo	58	12
Buduran	52	28
Sedati	8	11
Waru	145	55
Gedangan	107	38
Taman	102	42
Krian	36	24
Balongbendo	27	15

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahun 2020

Berdasarkan data pada Tabel 2 Kecamatan Waru, Gedangan, dan Taman merupakan kecamatan dengan jumlah perusahaan industri besar-sedang terbesar dimana lebih dari 400 perusahaan terdapat di tiga kecamatan tersebut. Oleh karena itu, tiga kecamatan tersebut menjadi wilayah sentra industri di Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya jumlah industri pengolahan pada wilayah tersebut berkaitan dengan letak geografis Kabupaten Sidoarjo yang berdampingan dengan Kota Surabaya dan juga objek-objek penting perekonomian (bandara, terminal, dsb) terletak diwilayah tersebut.

Kemudian bila dilakukan pemetaan menurut kategori/jenis usahanya, Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan

makanan dan minuman. Kondisi tersebut sesuai dengan data pada Tabel 3 dimana terdapat 221 perusahaan yang bergerak dibidang terkait, dimana jumlah tersebut merupakan 22,99 persen dari total keseluruhan perusahaan industri pengolahan di Kabupaten Sidoarjo. Selengkapnya jumlah perusahaan industri besar-sedang menurut jenisnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Persentase Perusahaan Industri Besar-Sedang menurut Jenisnya di Kabupaten Sidaorjo Tahun 2020

Jenis Industri Besar Sedang	Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)
Makanan dan Minuman	221	22.99
Pengolahan Tembakau	16	1.66
Tekstil dan Pakaian Jadi	39	4.06
Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	72	7.49
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	20	2.08
Kertas dan Barang dari Kertas	42	4.37
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	34	3.54
Produk dari Batubara dan Penggilingan Minyak Bumi	4	0.42
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	61	6.35
Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	12	1.25
Karet, Barang dari Karet dan Plastik	127	13.22

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahun 2020

Tabel 3. Persentase Perusahaan Industri Besar-Sedang menurut Jenisnya di Kabupaten Sidaorjo Tahun 2020

Jenis Industri Besar Sedang	Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)
Barang Galian Bukan Logam	32	3.33
Logam Dasar	17	1.77
Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	83	8.64
Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	10	1.04
Peralatan Listrik	26	2.71
Mesin dan Perlengkapan	39	4.06
Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	22	2.29
Alat angkutan Lainnya	13	1.35
Furnitur	47	4.89
Pengolahan Lainnya	22	2.29
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	2	0.21

Sumber: Survei Industri Besar Sedang Tahun 2020

Dominasi industri makanan dan minuman tersebut membuat peranannya terhadap PDRB Kab. Sidoarjo tahun 2020 sangat tinggi yaitu 23 persen terhadap total PDRB tahun 2020 atau sekitar 45.753 miliar rupiah.

Jenis/kategori industri terbesar selanjutnya adalah industri karet, barang dari karet, dan plastik dengan jumlah perusahaan adalah 127 diikuti oleh perusahaan barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebagai kategori tertinggi selanjutnya dengan jumlah perusahaan yang terdapat di Kab. Sidoarjo sebesar 83 perusahaan.

Sedangkan sebagai wilayah bukan potensi sumber daya alam tidak terbaharukan membuat jumlah perusahaan yang bergerak pada bidang tetkait (produk dari batubara dan penggalian minyak bumi) di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jenis/kategori lainnya. Negara/wilayah tertentu memiliki spesialisasinya masing-masing sehingga komponen yang diproduksi juga akan berbeda, oleh karena itu jenis.kategori usaha yang dijalankan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo sangat bervariasi.

Padi

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam menunjang ekonomi berkelanjutan, khususnya pada tujuan dua yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian berkelanjutan.

Sejak tahun 2018 BPS melakukan estimasi luas panen baik padi maupun palawija dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), pengideraan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

Luas Panen

Berdasarkan hasil survei KSA, secara umum luas panen di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 dan tahun 2020 tidak berbeda signifikan, dimana pada tahun 2019 total luas panen adalah 34,29 ribu hektar, sedangkan pada tahun 2020 adalah 34,22 ribu hektar. Berdasarkan tren data yang dihasilkan, baik tahun 2019 dan tahun 2020, luas panen memiliki titik tertinggi pada bulan Mei dan Oktober. Titik puncak tersebut menandakan bahwa pada periode tertetu sedang terjadi panen raya.

Setelah fase panen raya berakhir (bulan September–Desember) maka selanjutnya akan masuk ke fase persiapan lahan (Januari–April) sehingga pada bulan Januari–April umumnya menjadi *subround* dengan luas panen terendah. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan luas panen dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2. Luas Panen Padi Bulanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2020 (Ribuan Hektar)

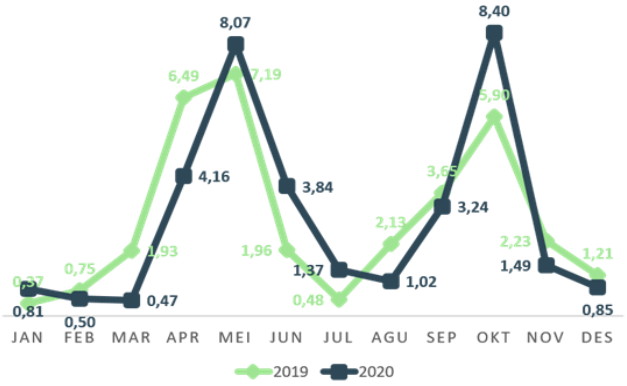

Sumber: Hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2020

Produksi dan Konsumsi

Total produksi beras pada tahun 2020 turun sebesar empat persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 konsumsi masyarakat adalah 239,41 ribu ton beras, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 243,53 ribu ton beras. Artinya selama periode tahun 2019–2020 konsumsi masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1,7 persen.

Produksi beras tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 36,54 ribu ton beras, sedangkan produksi terendah terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 1,39 ribu ton beras. Untuk konsumsi masyarakat secara tren cenderung tetap, dimana jumlah konsumsi tertinggi masyarakat adalah sebesar 20,63 ribu ton beras dan konsumsi terendahnya adalah 19,30 ribu ton beras yang terjadi pada bulan Februari.

Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan konsumsi dan produksi dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3. Konsumsi (Ton Beras) dan Produksi (Ton Beras) Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020

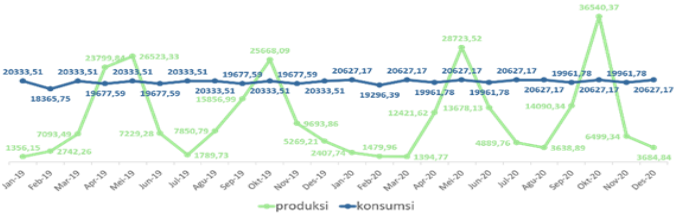

Sumber: Hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2020

Surplus/Defisit

Berdasarkan penjelasan pada uraian sebelumnya, selama periode 2019–2020 produksi beras terus mengalami penurunan, namun tingkat konsumsi masyarakat terus mengalami peningkatan. Artinya selama periode 2019–2020 Kabupaten Sidoarjo mengalami defisit sumber pangan berupa padi.

Gambar 4 menyajikan grafik besarnya defisit produksi beras yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2019–2020. Berdasarkan gambar tersebut, fase defisit terbesar terjadi pada *subround* pertama (*Subround* I) yaitu pada bulan Januari–April, sedangkan fase defisit terendah terjadi pada *subround* ketiga (*Subround* III) yaitu pada bulan September–Oktober.

Untuk lebih jelasnya mengenai defisit produksi dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 4. Surplus/Defisit Beras menurut *Subround* di Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020

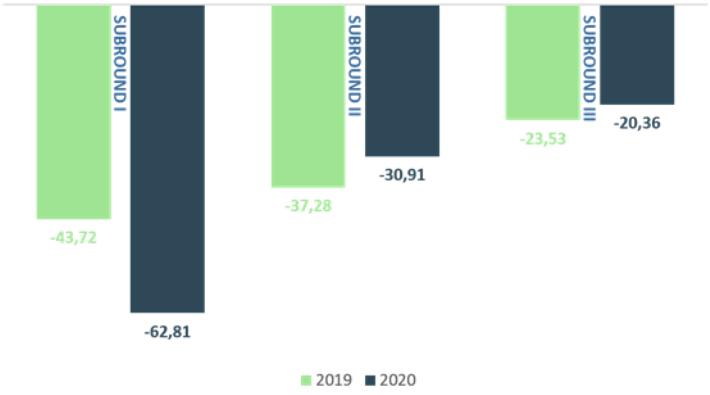

Sumber: Hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Tahun 2020

3 Produk Domestik Regional Bruto

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi kontraksi pertumbuhan hampir di sebagian besar kategori lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 197,24 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 6 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 204,20 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya deflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunanan, dari 140,49 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 135,31 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,69 persen.

Struktur Perekonomian Kabupaten Sidoarjo

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Tabel 4 peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 51,17 persen (angka tertinggi selama 5 tahun terakhir). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,02 persen (turun dari 16,29 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,68 persen, disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,40 persen (turun dari 11,24 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 3,86 persen.

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Reginal Bruto ADHB Kab. Sidoarjo Tahun 2019 –2020

Kategori	Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.07	2.25
B	Pertambangan dan Penggalian	0.09	0.06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Reginal Bruto ADHB Kab. Sidoarjo Tahun 2019 –2020

Kategori	Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
C	Industri Pengolahan	47.86	51.17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.85	0.85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.07
F	Konstruksi	8.68	8.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.29	16.02
H	Transportasi dan Pergudangan	11.24	7.40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.49	3.41
J	Informasi dan Komunikasi	3.46	3.86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.20	1.24
L	Real Estate	0.92	0.99
M,N	Jasa Perusahaan	0.16	0.16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.82	1.93
P	Jasa Pendidikan	1.16	1.25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.30	0.34
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.35	0.31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Pada tahun 2020, di antara kelima lapangan usaha tersebut, ada 2 kategori yang mengalami peningkatan peranan, yaitu Industri Pengolahan, dan Informasi dan Komunikasi. Kontruksi tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4 persen. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dipicu oleh sektor perikanan dan tanaman pangan (tanaman holtikultura dan perkebunan).

Salah satu penyebab menurunnya peranan Transportasi dan Pergudangan adalah penurunan jumlah penumpang dan angkutan barang/kargo pesawat udara yang disebabkan oleh larangan dari pemerintah untuk bepergian jarak jauh karena pandemi Covid-19.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Gambar 5. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Positif di Kab. Sidoarjo Tahun 2020

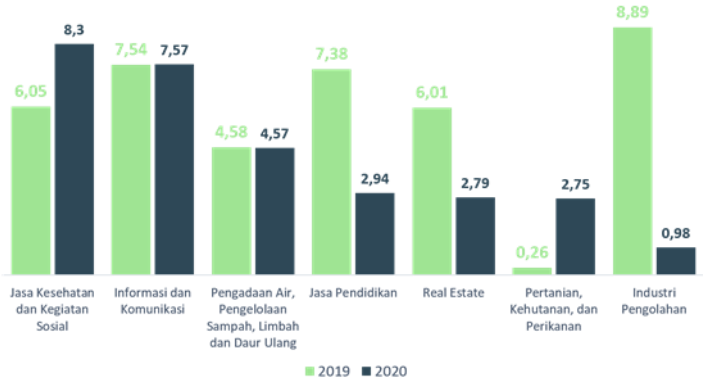

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai angka di atas 7 persen dicapai oleh 2 lapangan usaha, yaitu lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,30 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,57 persen.

Pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2020 didorong oleh peningkatan pasien sakit dikarenakan musim hujan badai, banjir, suhu dingin, cuaca ekstrim dan Covid-19. Selanjutnya adanya peningkatan anggaran dibidang kesehatan untuk penanganan Covid-19. Kemudian karena pasien lama kontrol ke Rumah Sakit, Klinik, Prakter Dokter, Puskesmas. Selain itu terjadi pula peningkatan masyarakat untuk melakukan Rapid Test, Antigen, dan SWAB PCR pada laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya. Dan juga karena

peningkatan pelanggan/konsumen pada klinik herbal/alternatif sebagai penunjang pemeliharaan kesehatan.

Sedangkan akselerasi kinerja lapangan usaha Informasi dan Komunikasi didorong oleh Pemberlakuan bekerja dan sekolah dari rumah yang menuntut masyarakat untuk bekerja dan bersekolah secara daring di rumah meningkatkan penggunaan kuota internet. Selain itu, pelarangan mudik menyebabkan komunikasi masyarakat lebih banyak dilakukan secara online via Whatsapp, Zoom Meeting, dan Social media lainnya.

Gambar 6. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Negatif (Kontraksi) di Kab. Sidoarjo Tahun 2020

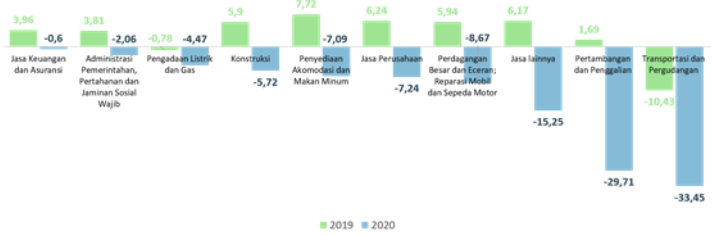

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Tiga Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil. Rendahnya daya beli masyarakat karena penurunan pendapatan menyebabkan sepinya pasar jual beli online di awalawal terjadinya pandemi COVID-19 sehingga permintaan jasa kurir pun ikut menurun. Peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan usaha untuk berhenti

beroperasi beberapa bulan karena COVID-19 menyebabkan produktivitas pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menurun.

Sementara itu pelarangan mudik saat Lebaran dan Natal, dan hari besar lainnya di masa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan yang sangat signifikan pada permintaan peralatan pribadi dan rumah tangga baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Sehingga kontraksi pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Laju pertumbuhan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel % sebagai berikut:

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Kategori	Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.26	2.75
B	Pertambangan dan Penggalian	1.69	-29.71
C	Industri Pengolahan	8.89	0.98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0.78	-4.47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.58	4.57
F	Konstruksi	5.90	-5.72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.94	-8.67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Sidoarjo Tahun 2020 (Lanjutan)

Kategori	Uraian	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
H	Transportasi dan Pergudangan	-10.43	-33.45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.72	-7.09
J	Informasi dan Komunikasi	7.54	7.57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.96	-0.60
L	Real Estate	6.01	2.79
M,N	Jasa Perusahaan	6.24	-7.24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.81	-2.06
P	Jasa Pendidikan	7.38	2.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.05	8.30
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.17	-15.25
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.99	-3.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Analisis *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tabel 6. Analisis *Location Quotient* (LQ) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Uraian	2019		2020	
	LQ	Keterangan	LQ	Keterangan
Pertambangan dan Penggalian	0.02	Non Basis	0.02	Non Basis
Industri Pengolahan	1.69	Basis	1.77	Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	2.74	Basis	2.72	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.78	Non Basis	0.79	Non Basis
Konstruksi	0.99	Non Basis	0.98	Non Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.87	Non Basis	0.85	Non Basis
Transportasi dan Pergudangan	2.36	Basis	1.79	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.64	Non Basis	0.66	Non Basis
Informasi dan Komunikasi	0.76	Non Basis	0.75	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.46	Non Basis	0.31	Non Basis

Tabel 6. Analisis *Location Quotient* (LQ) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Uraian	2019		2020	
	LQ	Keterangan	LQ	Keterangan
Real Estate	0.56	Non Basis	0.56	Non Basis
Jasa Perusahaan	0.2	Non Basis	0.20	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.77	Non Basis	0.77	Non Basis
Jasa Pendidikan	0.44	Non Basis	0.44	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.48	Non Basis	0.48	Non Basis
Jasa lainnya	0.26	Non Basis	0.26	Non Basis

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 6, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2019, sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 adalah sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Transportasi dan Pergudangan, dimana masing-masing memiliki nilai LQ 1,69; 2,74; dan 2,36. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo atau dapat disebut sektor basis. Selain itu, ketiga sektor tersebut dapat dikatakan menjadi sektor yang memiliki keunggulan komparatif, dimana hasil dari ketiga sektor tersebut tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Sidoarjo saja, namun juga dapat berpotensi untuk diekspor ke wilayah lainnya. Sementara itu, sektor selain Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, serta Transportasi dan Pergudangan memiliki nilai LQ

kurang dari 1 yang berarti bahwa produksi pada sektor-sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga diperlukan pasokan atau impor dari wilayah lain.

Selain itu, berdasarkan Tabel 6 diatas didapatkan hasil bahwa pada tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Transportasi dan Pergudangan, dimana masing-masing memiliki nilai LQ 1,77; 2,72; dan 1,79. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor basis atau sumber pertumbuhan ekonomi utama di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, jika dilihat secara tren, sektor yang memiliki perubahan paling besar di kabupaten sidoarjo adalah sektor transportasi dan pergudangan, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai LQ sebesar 0,57 satuan. Selain itu, perubahan paling besar selanjutnya diikuti oleh sektor jasa keuangan dan asuransi dengan penurunan sebesar 0,15 satuan pada 2020 dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 7. Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Kategori	Lapangan Usaha	2019		2020	
		RPs	RPr	RPs	RPr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.27	-0.18	2.91	-0.40

Keterangan: Nilai RPs/RPr > 1

Tabel 7. Analisis MRP (Model Rasio Pertumbuhan) Menurut Lapangan Usaha Kab. Sidoarjo Tahun 2020 (lanjutan)

Kategori	Lapangan Usaha	2019		2020	
		RPs	RPr	RPs	RPr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pertambangan dan Penggalian	1.15	0.27	7.11	1.75
C	Industri Pengolahan	1.30	1.24	-0.48	0.86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0.57	0.25	1.87	1.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.96	0.86	0.91	-2.11
F	Konstruksi	1.00	1.07	1.74	1.37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.00	1.08	1.51	2.41
H	Transportasi dan Pergudangan	-2.77	0.68	3.00	4.68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.02	1.37	0.80	3.72
J	Informasi dan Komunikasi	1.02	1.33	0.77	-4.12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.04	0.69	-0.01	-21.32
L	Real Estate	1.00	1.09	0.71	-1.66
M,N	Jasa Perusahaan	0.94	1.21	1.00	3.03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.02	0.67	5.34	0.16
P	Jasa Pendidikan	1.02	1.32	0.74	-1.66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.80	1.37	0.95	-3.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.99	1.13	1.11	5.78

Keterangan: Nilai RPs/RPr > 1

Berdasarkan Table 7, klasifikasi kegiatan perekonomian menurut nilai RPr dan RPs periode 2020 adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi 1, yaitu nilai RPr (+) dan RPs(+) berarti sektor tersebut pada tingkat provinsi dan kabupaten memiliki pertumbuhan menonjol terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, dan Jasa Lainnya.
- Klasifikasi 2, yaitu nilai RPr (+) dan RPs(-) berarti sector tersebut pada tingkat provinsi menonjol namun pada tingkat kabupaten belum menojol, dimana terdapat pada sector Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- Klasifikasi 3, yaitu nilai RPr (-) dan RPs(+) berarti sector tersebut pada tingkat kabupaten menonjol namun pada tingkat provinsi belum menonjol, dimana terdapat pada sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
- Klasifikasi 4, yaitu RPr (-) dan RPs(-) berarti sector tersebut pada tingkat kabupaten maupun provinsi memiliki tingkat pertumbuhan yang belum menonjol, dimana terdapat pada sector Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat transformasi dari beberapa sector lapangan usaha selama periode waktu 2019 ke 2020. Pada sector industri pengolahan;

informasi dan komunikasi; serta jasa pendidikan terjadi transformasi dari sektor pertumbuhan menonjol baik secara kabupaten maupun provinsi menjadi sector kurang menonjol baik secara kabupaten maupun provinsi. Untuk sektor industry pengolahan, adanya pembatasan mobilitas pekerja merupakan penyebab utama menurunnya produktifitas di berbagai perusahaan sehingga sulit bagi sektor industri pengolahan untuk menjadi sumber pertumbuhan utama di kabupaten sidoarjo. Begitu juga pada jasa pendidikan, masih adanya kegiatan pembelajaran jarak jauh atau belum adanya aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka penuh menjadi penyebab sektor jasa pendidikan bertranformasi menjadi sumber pertumbuhan kurang menonjol di kabupaten sidoarjo. Namun, ada hal menarik di sektor Informasi dan komunikasi yang menghasilkan nilai RPs kurang dari 1 pada tahun 2020 yang berarti sektor tersebut menjadi sektor yang kurang menonjol di kabupaten sidoarjo. Sektor informasi dan komunikasi seharusnya menjadi sektor yang menonjol di era pandemik karena konsumsi internet yang tinggi akibat kebijakan *work from home* (WFH) maupun kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jika dilihat secara provinsi, nilai RPr sektor informasi dan komunikasi bernilai lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi menonjol secara provinsi Jawa Timur.

Jika dilihat dari pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo (RPs) saja, sektor yang berubah dari menonjol menuju tidak menonjol adalah industri pengolahan; penyedia akomodasi dan makan minum; dan jasa pendidikan. Kondisi tersebut terjadi akibat kondisi covid-19 yang masih berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat,

dimana adanya PSBB, masih terbatasnya tempat-tempat wisata yang dibuka, serta pembatasan pada pekerja yang sangat berpengaruh terhadap nilai produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Namun, terdapat juga sektor lapangan usaha yang bertransformasi dimana pada tahun 2019 tidak menonjol menjadi menonjol pada tahun 2020. Sector-sektor tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan listrik dan gas; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; jasa perusahaan; dan jasa lainnya. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang tahan di masa krisis tak terkecuali di masa pandemi covid-19. Hal tersebut terbukti pada saat krisis ekonomi 1998 dimana sektor pertanian menjadi sektor yang tetap tumbuh dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan Tabel 6 dan 7, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sektor lapangan usaha yang memiliki nilai RPs dan LQ lebih dari 1 adalah Industri Pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan utama di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2019. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa sektor

Industri Pengolahan memiliki keunggulan komparatif dibanding sektor lapangan usaha lainnya di kabupaten sidoarjo. Selain itu juga, berdasarkan nilai RPs dan LQ menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang menonjol secara Kabupaten Sidoarjo.

Sementara itu, berdasarkan Tabel 8 diatas, dapat dilihat juga bahwa pada tahun 2020, sektor lapangan usaha yang memiliki nilai RPs dan LQ lebih dari 1 adalah sektor

pengadaan listrik dan gas; serta sektor transportasi dan pergudangan. hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut menjadi sumber pertumbuhan utama di kabupaten sidoarjo di tahun 2020. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif serta menonjol secara kabupaten sidoarjo ditahun 2020.

Selain itu, hasil ini juga menjadi bukti bahwa terjadi perubahan sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten sidoarjo dalam kurun waktu 2019 hingga 2020.

4 Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara langsung memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati secara "merata" oleh seluruh penduduk di daerah tersebut. Diperlukan kebijakan untuk penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi agar mampu berkompetisi pada pasar kerja yang tersedia diharapkan akan mengurangi kesenjangan terhadap distribusi hasil pembangunan yang ada. Salah satu indikator yang dianggap bisa memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang ada di suatu daerah adalah indeks Gini (*Gini Rasio*).

Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36. Gini rasio kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.30, artinya Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

Gambar 7. Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Positif di Kab. Sidoarjo Tahun 2020

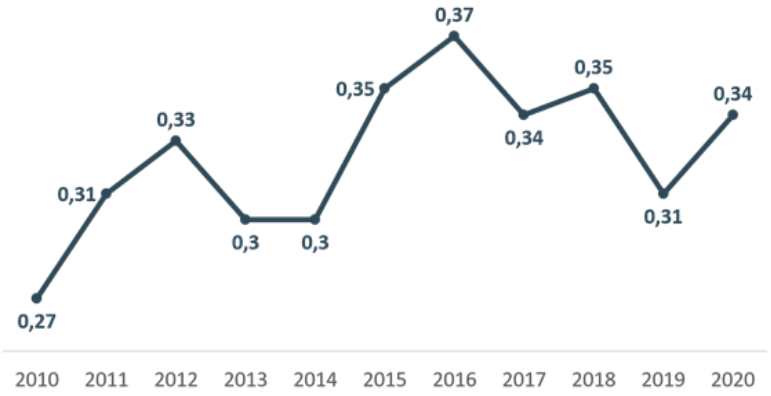

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 7 tren nilai gini ratio pada tahun 2016 mulai mengalami penurunan hingga tahun 2019, hal tersebut menandakan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kab. Sidoarjo terus mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tingkat ketimpangan adalah keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor-sektor penting penunjang kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut berubah pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat miskin dan rentan miskin semakin terpuruk sehingga gap pendapatan dengan masyarakat menengah semakin tinggi, hal tersebut yang menyebabkan nilai gini rasio Kab. Sidoarjo meningkat 0,03 satuan menjadi 0,34. Nilai gini rasio Kab. Sidoarjo tahun 2016–2020 berturut-turut adalah 0,37; 0,34; 0,35; 0,31; dan 0,34.

5 Inflasi

Inflasi Secara Umum

Pada tahun 2020 perhitungan inflasi berbeda dengan tahun sebelumnya, sebab pada tahun tersebut terjadi pergeseran tahun dasar IHK dimana tahun dasar IHK yang digunakan adalah 2018=100. Oleh karena itu, penghitungan inflasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 menggunakan referensi hasil Survei Biaya Hidup tahun 2018 (SBH 2018) dari Kota Surabaya sehinggga penghitungan Nilai Konsumsi Dasar (NKD) juga menggunakan dasar Tahun 2018.

Paket komoditas Kabupaten Sidoarjo menggunakan paket komoditas dari Kota Surabaya melalui hasi SBH 2018 terdiri dari 420 ribu (empat ratus dua puluh ribu) komoditi barang dan Jasa, dengan beberapa penyesuaian paket komoditi di Kabupaten Sidoarjo dengan mengganti beberapa komoditas sehingga jumlah masih sama sebesar 420 komoditas. Terdapat penambahan 44 komoditas jika dibandingkan jumlah komoditas pada SBH 2012 yang berjumlah 376 komoditas. Adapun rincian pada SBH 2018 adalah terdapat 106 komoditas baru dan 62 komoditas terdahulu yang tidak didata beberapa barang dan jasa yang tidak biasa dikonsumsi dan ditemukan di pasaran, maka penyesuaian paket komoditi di Kabupaten Sidoarjo dengan mengacu syarat-syarat diatas menjadi 420 komoditas.

Pada tahun 2020 secara nasional maupun regional ekonomi sangat berdampak akibat pandemic covid-19 yang melanda Indonesia maupun global. Sejak bulan Maret 2020 virus covid-19 ditemukan di Indonesia saat itu pula perekonomian nasional mengalami trend negatif. Seluruh sektor ekonomi berdampak dengan akibat penerapan protocol kesehatan, adanya program Pemerintah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan anjuran Pemerintah "Stay at Home" sebagai upaya menekan penyebaran virus covid-19. Roda perekonomian melambat karena masyarakat menahan semua aktivitas luar dan banyak perusahaan mengalami pailit karena rendahnya permintaan pasar.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Sidoarjo dari bulan Januari sampai Desember tahun 2020 inflasi cenderung sangat rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun-tahun sebelumnya di bulan yang sama, hal tersebut salah satu akibat dari pandemi covid-19 yang melanda seluruh sector ekonomi Sidoarjo.

Gambar 8. Inflasi (Kalender) Bulanan Kab. Sidoarjo Tahun 2019–2020

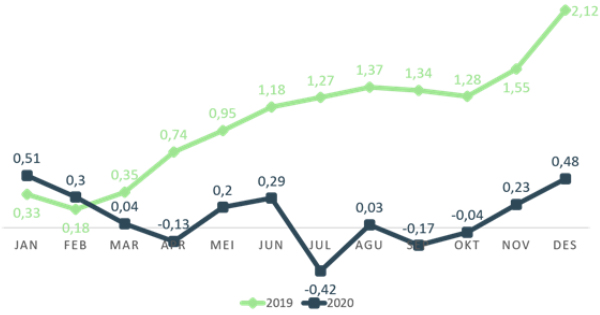

Sumber: Publikasi Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Kumulatif Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 (Januari sampai Desember) Tahun 2020 sebesar 1.30 %. Kumulatif Inflasi 9 Kab/Kota lainnya di Jawa Timur Tahun 2020, tertinggi 2.37 % terjadi di Kabupaten Sumenep dan terendah di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.30 %. Sementara kumulatif Inflasi Tahun 2020 Jawa Timur sebesar 1.44 % dan kumulatif Nasional yaitu 1.68 %. Secara nasional maupun regional besaran inflasi tahun 2020 cenderung lebih rendah jika dibanding tahun 2019. Pada Propinsi Jawa Timur hari besar agama yang biasanya mendorong inflasi berfluktuatif di setiap tahunnya tidak berlaku untuk tahun 2020 di rentang bulan April-Juni. Keadaan tersebut tergambar pada grafik dibawah:

Gambar 9. Inflasi (Kalender) Bulanan Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 –2020

Sumber: Publikasi Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Gambar 10. Inflasi (Kalender) Bulanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 –2020

Sumber: Publikasi Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu Kabupaten non Kota SBH melakukan penghitungan inflasi menggunakan metode sister city. Artinya bahwa penghitungan inflasi yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo menggunakan paket komoditas dan diagram timbang dari sister city yang dipilih. Kota Surabaya salah satu kota SBH dan letak geografis yang berdampingan dengan Sidoarjo sangat sesuai untuk dipilih sebagai sister city dalam penghitungan inflasi Kabupaten Sidoarjo. Karakteristik masyarakat Kota Surabaya hampir mirip dengan Sidoarjo. Oleh sebab itu dalam pemataan harga guna kebutuhan penghitungan inflasi di Sidoarjo harus menggunakan paket komoditas yang ada di Surabaya.

Gambar 11. Inflasi (Kalender) Bulanan Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya Tahun 2020

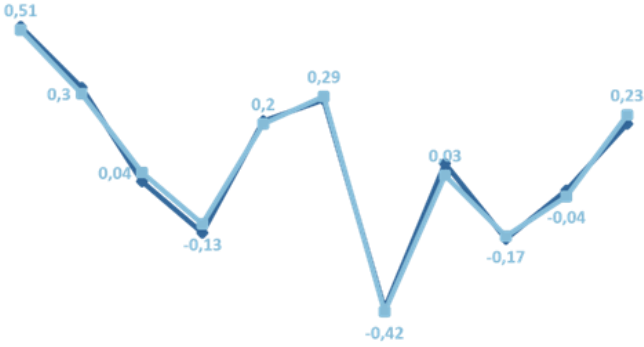

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
Kota Surabaya	0,52	0,32	0,01	-0,16	0,21	0,28	-0,41	0,07	-0,18	-0,02	0,2
Kab. Sidoarjo	0,51	0,3	0,04	-0,13	0,2	0,29	-0,42	0,03	-0,17	-0,04	0,23

Kota Surabaya Kab. Sidoarjo

Sumber: Publikasi Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Dari grafik diatas terlihat pergerakan inflasi selama 2020 Kabupaten Sidoarjo beriringan dengan Inflasi Kota Surabaya. Pada tahun 2020 berdasarkan kelompok pengeluaran terlihat bahwa makanan, minuman dan tembakau berperan besar dalam mempengaruhi besarnya inflasi disusul kelompok perumahan, air listrik gas dan BBM. Kelompok makanan, minuman dan tembakau menempati posisi ke dua dalam share inflasi tahun 2020. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberi andil tertinggi dalam pergerakan inflasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sebesar 0.5426 persen. Tahun 2020 banyak kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi inflasi secara nasional maupun regional antara lain penurunan tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan

tertentu, penyesuaian harga BBM pada beberapa kab/kota termasuk Sidoarjo, aturan bepergian selama pandemi covid-19 untuk angkutan udara, kereta api seperti pelaksanaan rapid, larangan mudik saat lebaran, dihilangkannya cuti bersama dan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Inflasi dan Sumbangan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Sementara dari 420 komoditas yang dipantau setiap bulan berikut 10 komoditas dengan perubahan harga tertinggi yang berpengaruh secara positip terhadap inflasi selama tahun 2020. Salah satu komoditas adalah emas perhiasan. Kenaikan harga emas perhiasan berlangsung beberapa bulan dimungkinkan karena gelombang stimulus fiskal dan moneter oleh bank sentral global untuk melawan dampak ekonomi dari penyebaran virus corona menurunkan minat investor untuk mendapatkan uang tunai sehingga permintaan logam mulia meningkat. Selain itu factor lain yang mendorong kenaikan harga emas adalah banyak para investor beralih ke pembelian emas antam sebagai logam save-haven ditengah krisis global dan pasar dibanjiri uang tunai dari bank-bank sentra pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemic covid-19.

Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga signifikan adalah vitamin terutama vitamin C. Seiring merebaknya wabah Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia khususnya di Sidoarjo membuat berbagai produk Vitamin C menjadi barang yang sulit ditemui. Imbasnya harga jual Vitamin C melonjak tinggi. Kelangkaan vitamin dan tingginya permintaan masyarakat untuk suplemen penangkal virus menyebabkan kenaikan harga vitamin di tahun 2020. Telepon seluler di tahun 2020 juga mengalami kenaikan harga yang berarti karena menjadi primadona untuk alat komunikasi.

Tingginya kebutuhan terhadap telepon seluler disebabkan oleh salah satunya metode pembelajaran yang bersifat daring (dalam jaringan) selama pandemic covid-19. Kebijakan pembelajaran daring (dalam jaringan) diterapkan oleh Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Maret 2020 dikarenakan arahan dari Kementrian Pendidikan yang melarang peserta didik melakukan tatap muka guna mengurangi resiko dari covid-19

Tabel 8. Inflasi dan Sumbangan Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Kab. Sidoarjo Tahun 2020

No	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1.68	0.5426
2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	1.01	0.3904
3	Transportasi	0.98	-0.1569
4	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.14	0.2414
5	Pakaian dan Alas Kaki	0.08	0.0036
6	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0.01	0.2303
7	Kesehatan	0	0.1202
8	Pendidikan	0	-0.0818
9	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0.15	-0.0681
10	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.17	0.109
11	Reaksi, Olahraga, dan Budaya	-0.28	0.0196

Sumber: Publikasi Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Komoditas Utama Pendorong Inflasi

Selain komoditas pendorong inflasi terdapat juga beberapa komoditas yang menghambat lajunya inflasi selama tahun 2020. Diantaranya adalah tarif angkutan baik kereta api, angkutan udara, BBM dan tarif PLN. Penurunan harga pada beberapa komoditas tersebut dikarenakan kebijakan yang dikelurkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya pengamanan sosial dalam rangka menghadapi pnadmei covid-19 selama tahun 2020.

Penurunan harga BBM jenis pertamaks merupakan implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Rincian penurunan tersebut adalah pertamak semula Rp. 9.850 per liter disesuaikan menjadi Rp. 9.200 per liter; jenis pertamaks turbo semula Rp. 11.200 per liter mejadi Rp. 9.900 per liter terjadi pada Januari 2020. Dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi jumlah penumpang angkutan udara baik domestic maupun insternasional. Dari data Angkasa Pura I periode April terjadi penurunan jumlah lalu lintas pesawat sebesar 62.18 persen. Sementara jumlah penumpang April menurun sebesar 75.89 persen. Oleh karena rendahnya permintaan terhadap angkutan udara mendorong jatuhnya harga tiket. Sementara tarif listrik PLN

juga mengalami penurunan disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan tarif baru pada bulan Oktober kepada tujuh golongan pelanggan sebesar Rp. 1.444 per Kwh dimana sebelumnya Rp. 1467 per Kwh. Penurunan sebesar Rp. 22.5 per Kwh ini di harapkan dapat meringankan beban masyarakat golongan rendah dalam masa pandemic. Berikut sepuluh komoditas yang menghambat laju inflasi.

Tabel 9. Sepuluh Komoditas Utama Pendorong Inflasi Kab. Sidoarjo Tahun 2020

No.	Kode	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	204015	Gulai	44.63277	0.07434
2	404005	Emas Perhiasan	37.36037	0.385858
3	402037	Pembalut Wanita	36.54209	0.112375
4	108010	Jeruk	24.48276	0.070686
5	502011	Vitamin	20.00406	0.077458
6	202010	Kopi Bubuk	16.87528	0.073365
7	702014	Telepon Seluler	8.616667	0.070805
8	204032	Nasi dengan Lauk	7.104804	0.070994
9	301059	Tukang Bukan Mandor	5.696203	0.076616
10	301029	Kotrak Rumah	1.78956	0.091067

Sumber: Publikasi Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Komoditas Utama Penghambat Inflasi

Tabel 10. Sepuluh Komoditas Utama Penghambat Inflasi Kab. Sidoarjo Tahun 2020

No.	Kode	Kelompok Pengeluaran	Inflasi (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	303032	Panci	-27.7122	-0.059504
2	108002	Anggur	-17.3055	-0.029526
3	701022	Tarif Kereta Api	-15.733	-0.029579
4	204053	Pizza	-13.9075	-0.031544
5	701005	Angkutan Udara	-8.76557	-0.135028
6	601153	Sekolah Menengah Pertama	-7.04061	-0.048911
7	102016	Daging Sapi	-5.01487	-0.042472
8	204166	Juice Buah Siap Saji	-4.27487	-0.030531
9	701152	Bensin	-4.10971	-0.189339
10	302033	Tarif Listrik	-0.9696	-0.030488

Sumber: Publikasi Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

6 Hotel dan Pariwisata

Sektor lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum termasuk kedalam enam besar sektor lapangan usaha yang megalami kontraksi tertinggi di Kab. Sidoarjo. Salah satu komponen penting dalam sektor lapangan usaha penyedia jasa akomodasi makan dan makan minum di Kab. Sidoarjo adalah penyedia jasa perhotelan. Selain berperan sebagai wilayah penyangga Kota Surabaya, objek-objek penting kegiatan perekonomian seperti terminal dan bandara juga berlokasi di Kab. Sidoarjo sehingga fasilitas penginapan menjadi *support sistem* yang utama.

Gambar 12. Tingkat Penghunian Kamar (%) Hotel Berbintang Kab. Sidoarjo Tahun 2019-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Gambar 12 menyajikan bagaimana perkembangan penghunian kamar hotel berbintang selama tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 dimana data disajikan bulanan. Secara umum tren persentase penghunian kamar tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019. Kondisi tersebut merupakan dampak merebaknya virus Covid-19 dimana mobilitas dan aktivitas masyarakat dibatasi.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja sub-sektor perhotelan adalah melalui Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Jika diamati dengan seksama, pada tahun 2019 persentase TPK pada bulan Februari, Maret, dan April memiliki nilai TPK yang stabil dan menurun pada bulan Mei, namun pada tahun 2020 penurunan nilai TPK terjadi sejak bulan Maret 2020. Pada bulan tersebut, diumumkan kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia tepatnya pada tanggal 6 Maret 2020 sehingga secara nonformal terjadi pengurangan aktivitas luar ruangan oleh masyarakat baik domestik maupun internasional. Untuk bulan-bulan berikutnya pemerintah telah menerbitkan peraturan resmi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat aktivitas terkait jasa akomodasi dan penyedia makan minum terhenti sementara pada bulan Maret dan April tahun 2020.

Indikator selanjutnya yang dapat diamati adalah rata-rata lama menginap (Tabel 12). Pada tahun 2020 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) untuk hotel berbintang sebesar 42,61 persen dengan rata-rata lama menginap amu selama 2 hari untuk tamu asing dan domestik. Artinya, secara rata-rata dalam sebulan dari setiap 100 kamar yang tersedia pada hotel berbintang ada sebanyak 42 kamar yang terjual, dengan lamanya tamu menginap sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) hari.

Tabel 12. Rata-Rata Lama Menginap Tamu Luar Negeri dan Domestik Pada Hotel Berbintang

NO	BULAN	RATA-2 LAMA TM MENGINAP		
		ASING	DOMESTIK	JUMLAH
1.	JANUARI	1.51	1.25	1.26
2.	FEBRUARI	2.53	1.27	1.33
3.	MARET	2.47	1.60	1.63
4.	APRIL	3.01	2.10	2.13
5.	MEI	5.46	1.83	1.86
6.	JUNI	3.34	1.81	1.82
7.	JULI	7.29	1.63	1.64
8.	AGUSTUS	9.17	1.80	1.83
9.	SEPTEMBER	5.33	1.71	1.72
10.	OKTOBER	2.04	1.54	1.54
11.	NOPEMBER	4.37	1.50	1.50
12.	DESEMBER	2.44	1.60	1.60
	Tahunan	4.08	1.64	1.66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

Akibat adanya kebijakan PSBB dan *lockdown* baik secara regional, nasional, maupun internasional selain merubah tren nilai TPK dan rata-rata lama menginap

juga menyebabkan komposisi tamu yang tinggal di hotel berbintang juga berubah. Berdasarkan Gambar X awal tahun 2020, yaitu pada bulan Januari–April rata-rata tamu asing adalah 4,26 persen. Rata-rata tersebut menurun signifikan dimulai pada bulan Mei, dimana rata-rata tamu asing pada bulan Mei–Desember adalah 0,41 persen. Selain kebijakan pemerintah pusat untuk menutup jalur penerbangan dari negara tertentu, beberapa negara juga menerapkan kebijakan serupa dimana menutup sebagian atau seluruhnya jalur penerbangan di negara masing-masing, seperti Arab Saudi yang bahkan meniadakan ibadah haji dan umroh bagi masyarakat asing.

Gambar 13. Komposisi Tamu Hotel Berbintang Kab. Sidoarjo Tahun 2020

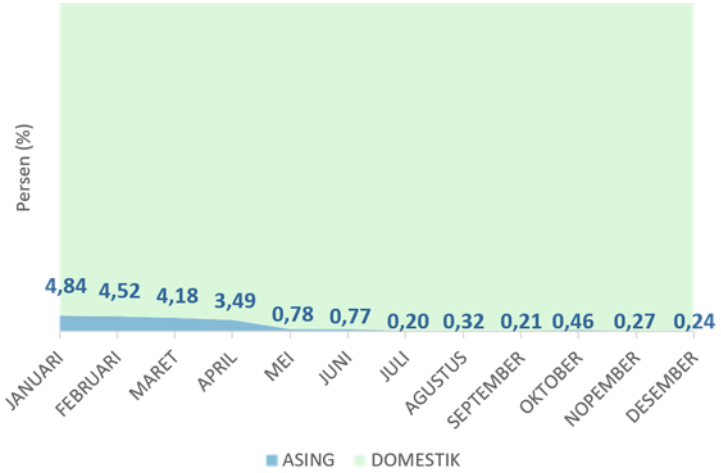

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo Tahun 2020

7 Perhubungan

Letak Bandara Internasional yang berada di wilayah Kab. Sidoarjo memberikan keuntungan tertentu. Selain menambah pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, letak strategis bandara internasional di Kab. Sidoarjo juga memberikan *multiplier effect* ekonomi yang menguntungkan diantaranya adalah penciptaan lapangan kerja baru diberbagai sektor dari mulai sektor transportasi, industri, akomodasi dan makan minum, jasa, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat gejolak penerbangan di Kab. Sidoarjo menjadi sangat penting untuk diamati.

Gambar 14. Jumlah Penumpang Pesawat Udara Tahun 2019-2020 dan Pertumbuhan Jumlah Penumpang Tahun (year-on-year) Kab. Sidoarjo

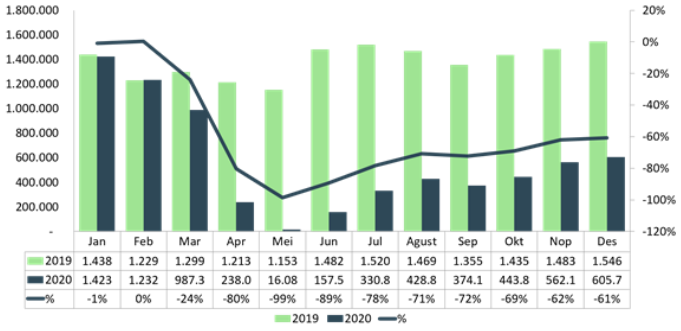

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
2019	1.438	1.229	1.299	1.213	1.153	1.482	1.520	1.469	1.355	1.435	1.483	1.546
2020	1.423	1.232	987.3	238.0	16.08	157.5	330.8	428.8	374.1	443.8	562.1	605.7
%	-1%	0%	-24%	-80%	-99%	-89%	-78%	-71%	-72%	-69%	-62%	-61%

Sumber: Laporan Bulanan SUB-Trafik Angkasa Pura Tahun 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo
Jl. Diponegoro No.139, Lemah Putro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
Telpon: (031) 8073915